

Imam Asngari, Pembagian Nilai Tambah Petani

**JURNAL
EKONOMI
PEMBANGUNAN**

Journal of Economic & Development
HAL: 77 - 90

PEMBAGIAN NILAI TAMBAH PETANI PLASMA PIR-SUS KELAPA SAWIT¹⁾

**Oleh:
Imam Asngari**

ABSTRACT

The aims of this study are to analyze the farmer's value added, efficiency and the factors affecting on the value added distribution. Location of the research is taken by using purposive sampling method on NES [Nucleus Estate and Smallholders] at the regency of Muara Enim in South Sumatera Province. Sample of Farmer's selected using stratified random sampling. The qualitative descriptive analysis is also applied in of this study through measuring intermediate cost variables, efficiency and value added distributions.

The result of this research sowed that farmer's low of the value added and efficiency performance. Efficient Farmer's is reached when value added and productivity highly, lower cost production, and labor exploitation. Factors inefficiency causing lost of the production surplus, by factors interest rate exploited, and increase disguised unemployment. The height Farmer's quality and efficiency are to be increase the equality for value added distributions. The more rigid on value added distributions influenced by inefficiency, lowest education, and medium productivity ages. All the impacted assumedly exploitation mechanism to impact of decrease farmer's efficient and increase to gap value added distribution, and it does to affecting on the poverty.

Keywords: *cost, efficiency, farmer's quality, exploitation, value added distributions.*

PENDAHULUAN

Penduduk Indonesia yang bekerja di sektor pertanian saat ini terus menurun menjadi sekitar 44 persen dari 50-an persen pada satu dasawarsa sebelumnya, namun yang tinggal di perdesaan masih tetap tinggi di atas 60 persen. Menurunnya pekerja di sektor pertanian bukan karena berhasil diserap oleh sektor industri dan jasa di perkotaan, melainkan penduduk telah beralih pekerjaan ke sektor informal perdesaan

¹ Dosen Fakultas ekonomi

dan perkotaan. Peralihan pekerjaan ini hanya mampu menekan angka pengangguran terbuka, tetapi tidak pada pengangguran tersembunyi. Peralihan pekerjaan ke sektor yang kurang produktif, justru akan menurunkan tingkat kesejahteraan. Jika dibandingkan, penduduk di sektor pertanian dan sektor informal di perdesaan tingkat kesejahteraannya relatif lebih rendah dari mereka yang bekerja di sektor industri dan sektor jasa di perkotaan. Perbedaan ini dapat diamati dari jumlah penduduk miskin yang menumpuk di wilayah perdesaan dan pekerja pertanian. Kemiskinan yang disertai dengan pengangguran tersembunyi akan menjadi beban yang berat bagi kelanjutan sektor pertanian dan pembangunan wilayah perdesaan.

Penduduk miskin di perdesaan pada sepuluh tahun terakhir rata-rata mencapai 23,4 juta jiwa atau sekitar 18 persen per tahun, sedangkan di perkotaan relatif rendah, yaitu 11,54 juta atau sekitar 16,2 persen per tahun. Kemiskinan yang terjadi di perdesaan maupun perkotaan berkaitan dengan tingkat pengangguran tersembunyi (*disguised unemployment*) yang tinggi, yakni sekitar 35 persen. Kemiskinan di wilayah perdesaan disebabkan karena sumber penghasilan rumah tangga penduduk masih mengandalkan sektor pertanian. Faisal Basri (1995:186-188), menggunakan data SUSENAS 1990, menemukan bahwa sekitar 45 persen rumah tangga miskin di perdesaan penghasilannya berasal dari subsektor tanaman pangan, dan sekitar 26 persen berasal dari subsektor perkebunan. Kemiskinan yang menimpa petani terjadi akibat produktivitas dan nilai produk marjinal sektor pertanian terus mengalami penurunan. Kemiskinan tadi akan semakin parah apabila kebijakan pemerintah kurang memihak dan kurang menguntungkan petani.

Menurunnya produktivitas dan nilai produk sektor pertanian akan berdampak pada rendahnya nilai tambah, sehingga kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto terus mengalami penurunan. Penurunan sumbangan sektor pertanian tersebut karena pembangunan pertanian terlalu bertumpu pada subsektor tanaman pangan. Padahal subsektor tanaman pangan sulit diandalkan untuk meningkatkan pendapatan rakyat dan kecil sumbangannya terhadap penerimaan devisa negara. Pengalaman demikian, mendorong pemerintah untuk mengembangkan subsektor perkebunan.

Perkebunan dicanangkan sebagai penyangga bagi kegiatan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah sektor pertanian dan sektor industri. Oleh karena itu, agroindustri di perdesaan menjadi amat strategis guna mengurangi laju stagnasi di sektor pertanian. Manfaat ekonomis agroindustri antara lain mendukung fungsi ideal sektor pertanian di perdesaan, terutama dapat memperluas kesempatan kerja, meningkatkan nilai tambah, meningkatkan pendapatan terutama bagi petani, dan dapat meningkatkan mutu hasil produksi pertanian yang akhirnya memenuhi syarat pasar luar negeri dan dapat menghemat devisa karena menggantikan produk-produk yang semula diimpor (Sumodiningrat, dalam Sayogyo dan Tambunan 1990:114).

Kebijakan yang mampu mendorong penciptaan keterkaitan (*linkage*) antara industri dan perkebunan dimulai dengan memberi kemudahan kepada para pengusaha besar sebagai pemilik modal untuk memperoleh konsesi lahan bagi usaha perkebunan besar melalui HGU (Hak Guna Usaha) sekaligus kemudahan dalam perizinan membangun pabrik pengolahannya. Legalisasi HGU yang diberikan kepada investor

asing (PMA) dan investor dalam negeri (PMDN) terutama untuk perkebunan dan HTI (Hutan Tanaman Industri) (Basyar, 1999:131-171)

Kemudahan investor memperoleh HGU, terkait dengan ambisi Indonesia untuk kedua kalinya menjadi eksportir minyak sawit dunia. Setelah tahun 1938 mengeksport 220.702 ton dan menjadi pengeksport minyak sawit terbesar dunia, maka kejayaan Indonesia akan terulang kembali setelah tahun 2004. Berdasarkan asumsi pertumbuhan produksi minyak sawit 6,5-7,0 persen per tahun, (*ceteris paribus*), maka pada tahun 2000 produksi minyak sawit Indonesia telah mencapai 7,5 juta ton dan Malaysia 9,6 juta ton, sehingga setelah tahun 2004 Indonesia bisa menghasilkan minyak sawit 11,9 juta ton dan menggeser Malaysia yang produksinya 11,2 juta ton (Basyar, 1999:38).

Perkebunan kelapa sawit terus dikembangkan secara besar-besaran oleh perusahaan negara (PTPN) dan perusahaan besar swasta, asing (PMA) maupun domestik (PMDN). Pembangunan perkebunan besar juga dilakukan melalui Pola PIR-BUN (Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan) baik PIR-TRANS, PIR-SUS, PIR-LOK, maupun PIR-Berbantuan (Dirjen Perkebunan, 1986). Tujuan proyek PIR-BUN antar lain meningkatkan produksi dan ekspor non migas, pemanfaatan sumberdaya lahan, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, khususnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani perkebunan (Dirjen Perkebunan, 1986). Berdasarkan tujuan tadi, keberhasilan program PIR-BUN antara lain dapat dilihat dari kinerja nilai tambah, tingkat efisiensi dan kehidupan petani plasma.

Kinerja petani untuk menciptakan nilai tambah secara efisien ditentukan pula oleh bekerjanya sistem usaha tani kontrak (*contract-farming*) yang berlaku dalam program PIR. Sistem PIR umumnya melahirkan struktur pasar yang monopsonistik dan dalam hal tertentu sekaligus menciptakan monopoli. Sepanjang sejarah, struktur pasar monopsoni dan monopoli menimbulkan berbagai distorsi dalam kinerja ekonomi makro oleh karena eksploitasi yang luar biasa dalam perekonomian, bahkan dapat mengancam terjadinya krisis ekonomi (Hasibuan, 1993a:170-189 dan 1997). Secara mikro, dalam kasus PIR-BUN juga akan muncul berbagai distorsi baik pada awal mulai proyek hingga beberapa tahun proyek PIR-BUN berjalan. Perilaku perusahaan inti terhadap petani merupakan konsekuensi dari sistem tani kontrak, sehingga petani plasma akan makin tergantung pada inti. Ketergantungan petani sebagai pelaku kontrak sering kali tidak berdaya melepaskan diri dari jeratan eksploitasi. Masalah ini akan makin jelas apabila kinerja petani dalam menciptakan nilai tambah dan tingkat efisiensinya rendah dan kesenjangan yang mencolok dalam pembagian nilai tambah. Persoalan tadi mendorong penulis untuk meneliti pembagian nilai tambah petani plasma PIR-SUS kelapa sawit.

TINJAUAN PUSTAKA

Struktur pasar monopoli dan monopsoni yang ditemukan oleh Pierro Srafa (1926) dan Joan Robinson (1933), perilakunya eksploitatif terhadap sumberdaya termasuk tenaga kerja (Hasibuan, 1993a: 50-51). PIR-BUN yang dikembangkan melalui usaha tani kontrak, telah menciptakan struktur pasar monopsoni sekaligus monopoli, dan perilakunya eksploitatif terhadap petani plasma (Asngari, 2003:31). Dampaknya petani plasma akan menghadapi masalah penerimaan nilai tambah.

Goldsmith (1985: 1127) mengatakan kebanyakan nilai tambah dinikmati perusahaan inti dengan *mark-up* harga input dan menekan harga output petani oleh karena inti mampu menguasai kegiatan hulu dan hilir.

Perusahaan inti juga mampu mengeksploitasi petani plasma melalui margin harga sarana produksi seperti pupuk, obat-obatan kimia dan teknologi. Di sini nampak terjadi dualisme kemitraan jika dilihat dari kesenjangan memperoleh surplus. Inti memperoleh surplus dua kali, yaitu melalui *mark-up* harga input (termasuk bunga modal) dan margin harga tandan buah segar (TBS). Cayanov (1997) dalam White (1990:244) meramalkan petani plasma akan terperangkap pada pemerasan diri sendiri (*self exploitation*).

Berkaitan dengan bekerjanya mekanisme eksploitasi dalam sistem PIR tadi dapat dipastikan bahwa kinerja petani dalam menciptakan dan menerima nilai tambah menjadi semakin rendah. Jika pada tahap awal proyek PIR pola UPP (Unit Pengelola Proyek) di Labuhan Batu Sumatera Utara Efisiensinya cukup tinggi untuk suatu bidang usaha perkebunan dengan rasio B/C sebesar 2,6 (Daswir, 1985). Tetapi, kinerja PIR-BUN setelah puluhan tahun semakin memburuk. Berkaitan dengan tingkat efisiensi, Asngari (2003) telah mengukur tingkat efisiensi petani plasma PIR-SUS di Sumatera Selatan sebesar 1,26. Berdasarkan strata produksi, telah terjadi kesenjangan efisiensi. Strata rendah efisiensinya 0,86, strata menengah 1,42 dan strata tinggi 1,65.

Fakta ini semakin memperkuat tesis bahwa struktur pasar monopsoni dan monopoli selalu menimbulkan berbagai distorsi dalam kinerja ekonomi oleh karena eksploitasi yang luar biasa dalam perekonomian, bahkan dapat mengancam terjadinya krisis ekonomi (Hasibuan, 1993a:170-189 dan 1997). Secara mikro, dalam kasus PIR-BUN juga akan muncul berbagai distorsi baik pada awal mulai proyek hingga beberapa tahun proyek berjalan. Sistem kontrak selama ini telah mengakibatkan ketergantungan petani semakin tinggi kepada inti, bahkan sebagian besar petani tidak berdaya melepaskan diri dari ketergantungannya kepada inti karena terjerat eksploitasi.

Pembagian nilai tambah sulit ditemukan, namun pembagian pendapatan personal pada sektor pertanian yang pertama kalinya dilakukan oleh Irlan Soejono (1976), tentang distribusi pendapatan padi sawah di Jawa Tengah. Soejono mengambil 8 desa persawahan dengan 240 usaha tani, menyimpulkan bahwa pertumbuhan pendapatan petani tidak membawa keadaan distribusi pendapatan makin pincang, tetapi kepincangannya menurun. Kesempatan kerja makin terbuka dengan penggunaan input modern. Perluasan usaha di luar monokultur padi merupakan kegiatan yang memperbaiki struktur distribusi pendapatan (Soejono dan Birowo, 1982:135-138). M. Soeparmoko (1980:61-79), meneliti Daerah Irigasi Pakelan-Sampean Jawa Timur, menyimpulkan bahwa dengan tersedianya air yang semakin baik, petani-petani besar mengalami kenaikan pendapatan dan juga perbaikan dalam distribusi pendapatan. Sebaliknya petani kecil mengalami penurunan pendapatan, walaupun pendapatan mereka masih berada di atas pendapatan petani pada tahun sebelumnya. Bila ditinjau dari distribusi fungsional, maka bagian pendapatan untuk buruh tani semakin kecil, sedangkan bagian untuk golongan pemilik semakin besar. Disamping tidak terjadinya konsentrasi pemilikan tanah, rehabilitasi terhadap irigasi telah membuka kesempatan kerja yang lebih luas (Hasibuan, 1993b: 59-60).

Nurimansyah Hasibuan (1976), meneliti tentang pembagian pendapatan dan tanah usaha transmigran Desa Kemumu Provinsi Bengkulu, menyimpulkan bahwa kesempatan memperoleh irigasi merupakan sebagian sebab untuk mendapatkan pendapatan yang tinggi, sedangkan kepincangan pembagian pendapatan disebabkan oleh kepincangan distribusi tanah yang diusahakan (Hasibuan: 1993b: 135-151). Kamiliah Wilda, dkk (1998) meneliti distribusi pendapatan petani di sekitar lokasi UPT Transbangdep desa Cempaka, Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, menemukan bahwa distribusi pendapatan setelah ada transmigran menjadi lebih merata berdasarkan Angka Gini maupun Bank Dunia.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan bagian dari temuan hasil penelitian tentang pembagian nilai tambah petani Plasma PIR-SUS Kelapa Sawit terutama untuk mengkaji nilai tambah, efisiensi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian nilai tambah. Metodologi yang digunakan merupakan studi empirik dengan metode survei yang didukung data sekunder dari KUD dan hasil penelitian yang relevan. Penelitian ini secara *purposive* memilih lokasi pada PIR-SUS IIB Suli di Kecamatan Muara Enim dengan sampel dua desa yaitu, Muara Harapan dan Harapan Jaya. Sampel dalam penelitian ini diambil secara rambang berstrata (*stratified random sampling*). Klasifikasi strata sampel didasarkan atas tiga tingkatan produksi tandan buah segara (TBS) kelapa sawit. Penarikan sampel kepala keluarga (KK) petani plasma menjadi sampel pada masing-masing strata dilakukan dengan cara tidak proporsional sebanyak 70 responden.

Teknik analisis yang digunakan adalah *kualitatif-deskriptif*. Variabel yang dianalisis meliputi tingkat produksi dan pengaruh penggunaan input terhadap nilai tambah, efisiensi dan pembagian nilai tambah. Nilai tambah dihitung dari selisih nilai keluaran (output) dengan masukan madya. Nilai tambah bruto dihitung atas harga pasar, sebelum dikurangi pajak tidak langsung dan penyusutan sebagai nilai tambah netto, yang disebut nilai tambah atas faktor produksi.

Nilai tambah produksi TBS petani plasma dirumuskan;

$$NTB = \sum_{n=1}^k P.Q - \sum_{i=1}^k (wL + iMK + pMi + pPk + pPs)$$

dimana;

- P = harga produksi kelapa sawit (TBS) dalam Rp per kg
- Q = jumlah produksi kelapa sawit (TBS) dalam kg per kapling (2hektar)
- w L = besarnya biaya tenaga kerja dalam Rp per bulan
- iM_K = beban bunga modal dihitung dari cicilan kredit investasi petani (Rp per bulan)
- pM_t = jumlah biaya jasa pemasaran TBS (Rp per bulan)
- pP_k = jumlah biaya pembelian pupuk (Rp per kg)
- pP_s = jumlah biaya pembelian pestisida (Rp per kg)

Nilai tambah bruto dalam persamaan (1), dapat diubah menjadi nilai tambah netto dengan mengurangi besarnya penyusutan (D) dan pajak (Tx). Pajak tak langsung

dalam hal ini diwakili oleh pajak desa yang dipungut dari prosentase penjualan TBS petani (Rp0,5/Kg), dan petani masih bisa mengalihkan pajak desa tersebut dengan menekan upah maupun biaya tenaga kerja.

Efisiensi usaha perkebunan plasma kelapa sawit dirumuskan sebagai berikut;

$$\Xi_f = \frac{\text{Nilai Tambah Bruto}}{\text{Biaya Madia}}$$

Penciptaan nilai tambah dalam usaha perkebunan tidak efisien jika $\Xi_f < 1$, dan efisien jika $\Xi_f > 1$. Tingkat efisiensi rendah bila $\Xi_f = 1,00 - 1,49$, efisiensi menengah bila $\Xi_f = 1,50 - 1,99$ dan efisiensi tinggi bila $\Xi_f \geq 2,00$, atau nilai tambah yang dihasilkan dua kali lebih besar dari biaya madia yang dikeluarkan.

Sedangkan, pembagian nilai tambah diukur menggunakan pendekatan personal yang secara luas dihitung melalui angka Gini dan ukuran Bank Dunia yang merupakan rasio konsentrasi pendapatan untuk mengukur tingkat kepincangan pembagian pendapatan relatif diantara penduduk suatu negara, antar wilayah, dan antar golongan masyarakat. Angka Gini dapat juga dipergunakan untuk menggambarkan ketimpangan pembagian nilai tambah diantara petani plasma. Hasibuan (1993b:19), menulis rumusan angka Gini sebagai berikut;

$$G = (\sum_{i=1}^n X_i \cdot Y_{i+1} - \sum_{i=1}^n X_{i+1} \cdot Y) / 10.000$$

Pada penelitian ini; Y_i adalah proporsi kumulatif nilai tambah, sedangkan X_i adalah jumlah proporsi kumulatif penerima nilai tambah. Penggunaan formula (3) dengan asumsi bahwa penduduk dan nilai tambah dapat dibagi dalam lima kelas (20 persen per kelas). Berdasarkan angka Gini, pembagian nilai tambah akan semakin timpang apabila angka Gini mendekati 1 dan akan semakin merata bila angka Gini mendekati 0. Menurut H.T Osima, ketimpangan rendah apabila G kurang dari 0,3; ketimpangan sedang apabila G antara 0,3-0,4; dan ketimpangan tinggi apabila G di atas 0,4. (Widodo, 1990: 120).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PIR-SUS IIB dikenal dengan PIR-SUS IIB SULA (Sungai Lengi Plasma) yang terletak di Kecamatan Muara Enim dan Kecamatan Gunung Megang. Peserta menempati Lokasi PIR-SUS IIB di Kecamatan Muara Enim tahun 1989/1990. Desa Muara Harapan dan Harapan Jaya berada di Kecamatan Muara Enim. Jarak terdekat desa Harapan Jaya dengan Kota Muara Enim sekitar 8 km, sedangkan desa Harapan Jaya sekitar 12 km. Luas perkebunan di Desa Muara Harapan adalah 750 hektar, yang dikelola oleh 375 KK petani plasma. Sedangkan desa Harapan Jaya dengan luas kebun 842 hektar dikelola oleh 421 KK petani plasma. Desa Muara Harapan seluas 857,25 hektar dan dihuni oleh 1.433 Jiwa. Desa Harapan Jaya seluas 1.011 hektar dihuni oleh 1.335 Jiwa. Penduduk Muara Harapan 72 persen berpendidikan SD, sedangkan 26 persen berpendidikan SMP dan SMA, dan 2 persen berpendidikan setingkat sarjana. Sedangkan desa Harapan Jaya, 69 persen penduduknya berpendidikan SD, 29 persen SMP dan SMA, dan 2 persen berpendidikan setingkat sarjana. Organisasi masyarakat perkebunan telah berkembang

terutama koperasi. Koperasi Sumber Makmur terdapat di desa Muara Harapan, dan Koperasi Tunggal Perkasa di Desa Harapan Jaya. Usaha pokok koperasi adalah jasa penjualan TBS Kelapa Sawit ke perusahaan inti, dalam hal ini adalah PTPN VII dan penyalur saprodi (khususnya pupuk) yang dipasok PTPN kepada petani.

1. Nilai Tambah

Nilai tambah yang dihasilkan petani plasma kelapa sawit tidak selalu paralel dengan produksi TBS yang dihasilkan. Nilai tambah tergantung pada produktivitas faktor produksi dan biaya media yang dikeluarkan. Tabel 1, menunjukkan bahwa nilai tambah bruto (NTB) yang dihasilkan oleh petani plasma di Harapan Jaya sebesar Rp502.217 lebih tinggi dari NTB yang dapat dihasilkan oleh seluruh petani yakni Rp460.753, sedangkan NTB yang dihasilkan oleh petani plasma di Muara Harapan sedikit lebih rendah yakni Rp419.290. Hal ini berkaitan dengan kisaran NTB per bulan yang dihasilkan petani sampel di Harapan Jaya lebih tinggi yaitu antara Rp64.416 hingga Rp1.777.113 per kapling dibandingkan dengan Muara Harapan yang menghasilkan NTB antara Rp64.507 hingga Rp1.348.453 per kapling.

Petani strata pertama, di Muara Harapan menghasilkan NTB rata-rata sebesar Rp179.685 atau kurang dari 50 persen NTB yang sama di Harapan Jaya. Kecilnya NTB yang dihasilkan petani plasma Muara Harapan ini disebabkan karena produksi TBS hanya mencapai 818 kg per kapling atau jauh di bawah rata-rata produksi petani sampel yang mencapai 1.591 kg. Hal ini juga berkaitan dengan sulitnya petani plasma melakukan penggunaan input dari alternatif terbaiknya berkenaan beban bunga investasi yang tinggi. Petani strata kedua, di Muara Harapan berproduksi 2.006 kg TBS per kapling dengan NTB sebesar Rp602.878. Sedangkan di Harapan Jaya petani strata kedua menghasilkan 2.018 kg TBS dengan NTB Rp627.560. Kedua strata ini telah menghasilkan NTB melampaui NTB seluruh petani plasma sebesar Rp460.753 per kapling. NTB yang tinggi di kelompok ini berkaitan dengan beban kredit yang telah lunas meskipun masih menanggung beban asuransi, namun petani pada strata ini telah memiliki kepuasan kerja sebagai petani plasma dilihat dari tingkat pendidikan dan umur.

Tabel 1. Rata-rata Produksi TBS Kelapa Sawit dan Nilai tambah Bruto Per Bulan

Strata Produksi (Petani)	Desa Muara Harapan				Desa Harapan Jaya				Jumlah Dua Desa			
	Produksi TBS (Kg)	Nilai Tambah Bruto			Produksi TBS (Kg)	Nilai Tambah Bruto			Produksi TBS (Kg)	Nilai Tambah Bruto		
		Per RT Petani	Per Kapita	Per Kg TBS		Per RT Petani	Per Kapita	Per Kg TBS		Per RT Petani	Per Kapita	Per Kg TBS
Rendah	818	179.685	59.710	207	978	250.087	71.028	233	898	214.886	65.369	220
Menengah	2.006	602.878	153.234	302	2.031	627.560	160.641	306	2.018	615.219	156.938	304
Tinggi	3.174	1.010.537	241.366	317	3.850	1.260.045	314.886	326	3.512	1.135.291	278.126	322
Rata-rata	1.494	419.290	112.382	250	1.689	502.217	131.469	267	1.591	460.753	121.925	259

Sumber: Data lapangan

Jika dibandingkan, NTB yang dihasilkan oleh rumah tangga petani di Harapan Jaya jauh lebih tinggi dari Muara Harapan, yaitu Rp502.217 berbanding Rp419.290. Keadaan itu dapat terjadi, *pertama*, pada berbagai strata produksi, TBS yang dihasilkan petani plasma di Harapan Jaya selalu lebih tinggi dari produksi petani di Muara Harapan. *Kedua*, rata-rata beban pembayaran kredit (bunga investasi) di Muara Harapan lebih tinggi dari Harapan Jaya, yaitu Rp66.800 berbanding Rp45.353. *Ketiga*, perbedaan cicilan kredit dan bunga investasi yang mencolok antar strata. Pembayaran bunga modal dan cicilan kredit yang dibayar petani plasma Muara Harapan umumnya lebih tinggi dari Harapan Jaya. Keadaan ini akibat dari adanya petani plasma yang belum lunas kredit. Petani plasma Muara Harapan yang belum lunas kredit mencapai 21,3 persen, dibandingkan Harapan Jaya yang hanya 8,3 persen..

Perbedaan kondisi tadi, berdampak pada nilai tambah yang dihasilkan rumah tangga petani plasma. Petani di Harapan Jaya mampu menghasilkan NTB yang lebih tinggi dari NTB yang dihasilkan oleh rumah tangga petani di Muara Harapan. Menurut petani perbedaan nilai tambah yang diperoleh petani dapat saja terjadi karena perbedaan kesuburan tanah. Namun, kesuburan tanah bukanlah satu-satunya sebab, karena masalah kesuburan tanah dapat diatasi dengan teknologi hijau, yaitu melalui pemupukan dan teknis budidaya. Oleh karena itu, produktivitas lahan tergantung pada perawatan kebun. Perawatan kebun plasma kelapa sawit di Desa Harapan Jaya lebih baik dan intensif dibandingkan Muara Harapan. Kegiatan yang termasuk perawatan dalam kerangka produksi antara lain pemupukan, pembersihan lahan sawit, dan pemangkasan pelepah daun sawit. Biaya pemupukan di Harapan Jaya ternyata lebih tinggi dari Muara Harapan.

Perbedaan mencolok tingkat produksi selain berdampak pada perbedaan NTB yang dihasilkan setiap rumah tangga petani, juga pada NTB per kapita penduduk dan NTB per kg TBS. NTB per kapita penduduk di Harapan Jaya sebesar Rp 131.469, sedangkan NTB per kapita di Muara Harapan sebesar Rp 112.382. Padahal, rata-rata anggota keluarga petani sampel di Harapan Jaya lebih tinggi, yaitu 3,9 jiwa per keluarga dibandingkan 3,6 jiwa per keluarga di Muara Harapan. Data ini menggambarkan kemampuan nyata petani plasma di Harapan Jaya dalam menciptakan nilai tambah lebih tinggi dari pada petani plasma Muara Harapan. Penyebabnya petani plasma di Desa Harapan Jaya memiliki produktivitas dan efisiensi yang lebih tinggi dari yang dicapai petani plasma di Muara Harapan.

2. Efisiensi

Petani plasma yang efisien mencapai 55,70 persen (39 petani) dan petani yang tidak efisien mencapai 44,30 persen (31 petani). Menurut tingkatannya, petani dengan efisiensinya rendah mencapai 21,42 persen (15 petani), efisiensi menengah sebanyak 34,28 persen (24 petani) dan tidak ada yang mencapai efisiensi yang tinggi. Ada arah yang sama antara tingkat produksi dengan efisiensi. Strata produksi rendah sebanyak 40 petani sampel; diantaranya 29 tidak efisien, 6 efisiensinya rendah dan 5 efisiensinya menengah. Strata produksi menengah sebanyak 20 petani sampel; 2 tidak efisien, 9 efisiensinya rendah, dan 9 efisiensinya menengah. Strata produksi tinggi, 10 petani sampel seluruhnya efisien dengan tingkatan menengah. Semakin tinggi tingkat produksi TBS kelapa sawit, memiliki potensi untuk menciptakan nilai tambah yang semakin efisien.

Petani di strata produksi rendah seluruhnya tidak efisien, disebabkan; *Pertama*, bunga modal relatif tinggi dalam komponen biaya madia. *Kedua*, terdapat kecenderungan petani kaya lebih eksploitatif ke belakang ketimbang kedepan oleh karena dengan efisiensi yang tinggi, dicapai intensitas tenaga kerjanya rendah, walaupun produktivitas nyata tenaga kerja dan nilai tambahnya meningkat. Sebaliknya pada petani yang tidak efisien, intensitas tenaga kerja dan modal relatif tinggi, disisi lain produktivitas dan nilai tambah pekerja begitu rendah. Dalam dua keadaan yang berbeda ini, mekanisme eksploitasi tidak saja berlangsung sendiri tetapi juga berlaku kebiasaan yang kuat menindas yang lemah. *Ketiga*, petani yang tidak efisien karena tingkat produksi di bawah titik impas produksi, yaitu 704 kg TBS/kapling. *Keempat*, harga pokok TBS untuk menciptakan nilai tambah yang diproduksi petani belum efisien lebih tinggi dari harga pokok TBS rata-rata. Harga pokok TBS rata-rata seluruh petani sampel untuk menciptakan nilai tambah sebesar Rp260 per kg. Harga pokok TBS di Muara Harapan umumnya lebih tinggi, yaitu Rp269 per kg sehingga upaya petani untuk menciptakan nilai tambah tidak efisien. Harga pokok TBS di Harapan Jaya lebih rendah, yaitu Rp252 per kg, sehingga petani menjadi lebih efisien dalam menciptakan nilai tambah. Perbedaan harga pokok TBS ini dapat juga dipandang sebagai bukti adanya perbedaan dalam efisiensi. *Kelima*, secara teknis budidaya perkebunan tidak dilakukan secara intensif. Hal ini tercermin dari rendahnya curahan kerja dan relatif tingginya pengangguran tersembunyi.

Berdasarkan kondisi yang ideal, setiap petani dengan 5 anggota keluarga (termasuk anak), dalam setahun dapat memasok 720 HOK atau per bulan 60 HOK atau stara 420 jam kerja sebagai ukuran jam kerja normal petani per bulan. Jika jam kerja di bawah jam kerja normal berarti terdapat pengangguran tersembunyi yang dapat dihitung dari kapasitas jam kerja yang menganggur. Secara fisik, kapasitas jam kerja (KJK) diukur dari rasio jam kerja terhadap jam kerja normal, sementara intensitas tenaga kerja (INTA) dihitung dari rasio biaya madia tenaga kerja dan nilai tambah. Kaitan variabel tadi degan efisiensi dapat diamati dalam Tabel berikut.

Tabel 2. Tingkat Efisiensi, Kapasitas Jam Kerja, Pengangguran Tersembunyi dan Intensitas Pekerja Petani Plasma PIR-SUS Kelapa Sawit.

Strata Produksi	Muara Harapan				Harapan Jaya							
	EFI	KJK	PTS	INTA	EFI	KJK	PTS	INTA	EFI	KJK	PTS	INTA
Rendah	0,73	0,68	32,3	0,38	0,92	0,37	31,7	0,33	0,86	0,67	32,6	0,28
Menengah	1,38	0,83	17,1	0,21	1,47	0,81	18,6	0,19	1,42	0,82	17,8	0,20
Tinggi	1,59	0,91	9,2	0,19	1,69	0,71	12,9	0,15	1,65	0,89	11,1	0,17
Total	1,18	0,75	24,6	0,23	1,34	0,75	25,3	0,20	1,26	0,75	25,3	0,21

Keterangan: EFI = Efisiensi; PTS = Pengangguran Tersembunyi (dalam persen).

KJK= Kapasitas Jam Kerja Terpakai, INTA=Intensitas Tenaga Kerja.

Berdasarkan Tabel 2, EFI dan KJK memiliki arah yang sama yang berarti bahwa pengelolaan kebun semakin intensif, padat jam kerja. Sedangkan EFI dan INTA tidak searah yang berarti semakin padat modal. Namun demikian, jika dihitung masukan tenaga kerja per hektar menunjukkan bahwa sifat usaha perkebunan petani plasma dalam PIR-SUS kelapa sawit masih padat karya. Kecenderungan padat karya

lebih besar di Muara Harapan, sedangkan di Harapan Jaya cenderung intensif atau padat modal.

Pengangguran tersembunyi memiliki arah yang berlawanan (hubungan negatif) dengan efisiensi, dimana semakin rendah tingkat pengangguran tersembunyi maka tingkat efisiensi meningkat. Pengangguran pada strata produksi rendah mencapai 32,6 persen mengakibatkan efisiensinya hanya 0,86, dan pada strata produksi tinggi pengangguran tersembunyi hanya 11,1 persen, dan tingkat efisiennya mencapai 1,65.

Kecenderungan tadi terjadi karena sesama petani saling mengeksploitasi (*self exploitation*). Ramalan Cayanov terbukti di sini. Petani kaya melakukan eksploitasinya lebih ke belakang ketimbang kedepan, ditunjukkan dari intensitas tenaga kerjanya sangat rendah sedangkan efisiensi dan kapasitas jam kerja lebih tinggi. Berarti petani kaya dapat menekan upah atau biaya tenaga kerja sebagai kompensasi pajak desa dan surplus yang hilang karena eksploitasi. Dengan demikian penggunaan pajak desa sebagai pajak tak langsung dapat dibenarkan. Sementara itu, petani strata produksi rendah (miskin) tereksploitasi dari arah depan-belakang dan mekanisme ini berlangsung sendiri di kalangan petani, karena hanya intensitas tenaga kerjanya saja yang tinggi sedangkan efisiensi dan kapasitas kerja sangat rendah. Kapasitas kerja yang rendah mengindikasikan adanya pengangguran tersembunyi serta tenaga kerja menjadi tidak produktif yang mengakibatkan inefisiensi. Berkaitan intensitas tenaga kerja, maka di Harapan Jaya lebih menggambarkan adanya eksploitasi ke belakang (ke pekerja), sedangkan di Muara Harapan menggambarkan eksploitasi berjalan sendiri di kalangan petani. Dalam dua keadaan yang berbeda ini, sebagaimana telah disebutkan bahwa mekanisme eksploitasi berlangsung dengan sendirinya dari kebiasaan perilaku yang kuat menindas yang lemah.

3. Pembagian Nilai Tambah

Pembagian nilai tambah petani plasma secara umum sangat timpang diukur dari variabel nilai tambah netto bila dibandingkan menggunakan nilai tambah bruto baik menggunakan angka Gini maupun ukuran 40 persen terendah Bank Dunia. Angka Gini seluruh petani menggunakan ukuran netto sebesar 0,410 sedangkan menggunakan nilai tambah bruto sedikit lebih rendah yaitu 0,398. Kedua ukuran ini konsisten juga dengan menggunakan ukuran Bank Dunia yang membuktikan adanya ketimpangan mencolok dalam pembagian nilai tambah.

Tabel 3. Pembagian Nilai Tambah Petani Plasma PIR-SUS Kelapa Sawit

No	Variabel Dasar	Ukuran	Rata-Rata Nilai Tambah Brutto	Rata-rata Nilai Tambah Netto	Pembagian Nilai Tambah Bruto		Pembagian Nilai Tambah Netto	
					Angka Gini	40% Terendah	Angka Gini	40% Terendah
1.	Lokasi Desa	Muara Harapan	419.290,00	414.332,00	0,4045	11,7315	0,4048	11,4855
		Harapan Jaya	502.217,00	498.494,00	0,3870	13,7514	0,3903	13,5547
2.	Efisiensi	Efisien	698.194,00	694.489,00	0,2253	23,7981	0,2263	23,7203
		Tidak Efisien	162.038,00	157.475,00	0,2834	19,9985	0,2901	19,6561
3.	Pendidikan	SD	491.271,00	486.885,00	0,3756	13,6851	0,3787	13,4979
		SLTP	244.193,00	240.151,00	0,3738	15,9325	0,3810	15,5250
		SLTA	904.088,00	899.172,00	0,1828	28,4688	0,1840	28,4166
4.	Tingkat Hidup	Tidak Miskin	668.999,00	663.127,00	0,2386	24,2233	0,2622	24,1895
		Miskin	148.385,00	140.897,00	0,2656	21,5432	0,2621	21,6495
5.	Umur Petani	15 – 45 Th	438.850,00	434.595,00	0,4157	11,8620	0,4202	11,5755
		46 – 65 Th	481.440,00	477.019,00	0,3757	12,6395	0,3792	12,4637
6.	Luas Lahan Kelapa Sawit	1 Kapling	469.708,00	465.314,00	0,4027	11,5164	0,4057	11,2797
		> 2 Kapling	380.163,00	376.304,00	0,3441	17,9305	0,3470	17,7551
7.	Seluruh Petani	70 Responden	460.753,00	456.398,00	0,3983	12,0457	0,4104	11,8122

Sumber: Data Lapangan

3.1 Pengaruh Efisiensi Terhadap Pembagian Nilai Tambah

Berdasarkan faktor efisiensi, sumber ketidakmerataan nilai tambah meskipun tidak mencolok, lebih disebabkan oleh petani-petani yang tidak efisien. Sedangkan petani yang efisien pembagian nilai tambahnya lebih merata. Di sini tidak ditemukan adanya trade off antara efisiensi dengan pemerataan, melainkan semakin efisien ada kecenderungan semakin merata. Berdasarkan ukuran nilai tambah bruto dan netto, diperoleh koefisien Gini sebesar 0,22 bagi petani yang efisien dan 0,28-0,29 bagi petani yang tidak efisien. Dengan demikian ada faktor penyebab lain yang menimbulkan kepincangan dalam pembagian nilai tambah tadi. Sumber-sumber tadi akan dibahas lebih lanjut dari faktor kualitas petani dan pengaruh modal fisik.

3.2 Pengaruh Kualitas Petani Terhadap Pembagian Nilai Tambah

Kualitas petani dapat dilihat dengan indikator tingkat pendidikan, umur petani sebagai pengganti pengalaman dalam bertani, dan taraf hidup yaitu miskin dan tidak miskin. Berdasarkan Tabel 3, terlihat bahwa ketimpangan menengah terjadi pada jenjang pendidikan SD dan SMP, ketimpangan rendah terjadi pada jenjang pendidikan SLTA. Sedangkan taraf hidup miskin dan tidak miskin kurang memiliki perbedaan terhadap kesenjangan pembagian nilai tambah. Fakta ini menunjukkan bahwa berdasarkan pendidikan, semakin tinggi jenjang pendidikan, maka pembagian nilai tambah semakin merata, sebaliknya, semakin rendahnya jenjang pendidikan, pembagian nilai tambah

semakin pincang. Berdasarkan nilai tambah kelompok, petani yang berpendidikan SLTA memiliki rata-rata nilai tambah paling tinggi.

Berdasarkan faktor umur petani, maka sebab-sebab ketimpangan dapat ditemukan terutama pada kelompok petani-petani yang berumur tengah produktif (15-45 tahun). Ketimpangan ini nampak konsisten baik pada pembagian nilai tambah bruto maupun pada nilai tambah netto. Ketimpangan mencolok, terjadi pada petani kelompok umur 15-45 tahun dengan indeks Gini dari nilai tambah bruto maupun netto mencapai sekitar 0,42. Dengan ukuran Bank Dunia, sekitar 40 persen rumah tangga terendah hanya menerima nilai tambah netto maupun bruto kurang dari 12 persen, yaitu berkisar 11,5-11,8 persen. Kelompok umur diawal masa produktif ini terjadi karena masih minimnya pengalaman dan etos kerja dan berkaitan dengan tekanan kepuasan kerja, namun mobilitas yang tinggi memberikan peluang kerja relatif besar di luar usaha kelapa sawit. Sehingga kesempatan tadi mengakibatkan usaha pengelolaan kebun sawit tidak intensif, dan kelompok ini sama seperti pada petani yang berpendidikan SD dan SMP dengan pendapatan per kapita yang relatif rendah.

Uraian tadi membuktikan bahwa pembagian nilai tambah semakin merata dengan makin tingginya tingkat pendidikan dan efisiensi, demikian juga dengan petani yang memiliki lahan yang makin luas. Keadaan akan terjadi sebaliknya, dan hal ini dapat dipahami bahwa secara ekonomis, penambahan luas usaha dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, apabila dalam keadaan peningkatan skala produksi. Ketimpangan pembagian nilai tambah pemilik lahan lebih dari 2 kapling relatif rendah menunjukkan peningkatan efisiensi dan produktivitas berkaitan dengan bertambahnya luas kebun sawit.

3.4. Pengaruh Modal Fisik Terhadap Pembagian Nilai Tambah

Berdasarkan modal fisik, yaitu luas lahan ternyata memiliki pengaruh yang berbeda pada pembagian nilai tambah. Kepincangan mencolok pada petani yang berlahan satu kapling, baik menggunakan nilai tambah bruto, maupun nilai tambah netto, angka Gini mencapai di atas 0,4. Berdasarkan ukuran Bank Dunia petani yang memiliki lahan 1 kapling menerima nilai tambah hanya sekitar 11 persen.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kemitraan dalam sistem PIR ternyata bersifat eksploitatif dan berdampak buruk bagi petani plasma, yang tercermin dari nilai tambah dan efisiensi petani plasma begitu rendah, serta pembagian nilai tambah tidak merata. Kecenderungannya tingkat efisiensi memiliki nilai yang searah (berhubungan positif) dengan tingkat produksi, umur petani dan kepuasan kerja, dan berhubungan negatif dengan bunga modal, hilangnya surplus produksi, eksploitasi tenaga kerja, dan pengangguran tersembunyi.

Ada pengaruh yang kuat dari efisiensi dan kualitas sumber daya manusia terhadap pembagian nilai tambah. Makin tinggi tingkat efisiensi, jenjang pendidikan dan usia produktif, maka pembagian nilai tambah makin merata. Pengukuran kesenjangan pembagian nilai tambah sangat cocok bila diukur dengan variabel nilai tambah netto, baik menggunakan angka Gini maupun ukuran Bank Dunia. Kesenjangan nilai tambah sangat mencolok pada kelompok umur tengah produktif, dan cukup tinggi pada petani yang

berpendidikan rendah (SD dan SMP), dan petani dengan pengusahaan kebun seluas satu kapling. Rendahnya tingkat efisiensi tadi selain berdampak pada kesenjangan pembagian nilai tambah juga pada tingkat kehidupan petani yang tidak efisien pada umumnya menjadi miskin. Petani yang berhasil meningkatkan efisiensinya tidak lagi miskin.

Pembagian nilai tambah dapat lebih merata dengan cara membina petani miskin dalam teknis budidaya perkebunan, mempercepat transfer teknologi, memberikan insentif surplus produksi, memberikan bantuan permodalan, dan pengawasan konsentrasi lahan. Secara bertahap peranan inti harus semakin dikurangi dalam penyediaan saprodi dan dalam pemasaran TBS. Di masa yang akan datang, KUD dapat mengambil bagian dalam kegiatan pengolahan CPO dan minyak sawit.

DAFTAR RUJUKAN

- Anonymous*, Intruksi Presiden Republik Indonesia No 1 th 1986. Tentang Pengembang Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Yang Dikaitkan Dengan Program Transmigrasi, *Ditjen Perkebunan, Jakarta*, 1986.
- Asngari, Imam. *Nilai Tambah dan Efisiensi Petani Plasma PIR-SUS Kelapa Sawit*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Vol.5 No.1 Februari, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2003
- Basri, Faisal, *Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI : Distorsi, Peluang dan Kendala*, Erlangga, Jakarta, 1995.
- Basyar A. Hakim, *Perkebunan Besar KELAPA SAWIT : Blunder Ketiga Kebijakan Sektor Kehutanan*, Cetakan 1, E-LAW dan CEPAS, Indonesia, 1999.
- Birowo A.T. dan Irlan Sujono, *Distribusi Pendapatan Di Perdesaan Padi Sawah Di Jawa Tengah*, dalam Sajogyo, Bunga Rampai Perekonomian Desa, Yayasan Obor dan IPB Bogor, 1982.
- Daswir, dkk., *Analisa Biaya dan Curahan Tenaga Kerja Pola Tanam di Daerah Transmigrasi Lahan Alang-Alang Betung II, Supat, Sumatera Selatan*, Dalam Buletin Perkebunan, No. 16 Volume 2, Penerbit Balai Penelitian Perkebunan Medan, 1985.
- Glover, D., *Contract Farming and Smallholder Outgrower Schemes in Less Developed Countries*, Word Development, 12 No. 11/12, 1984.
- Hasibuan, Nurimansjah, *Ekonomi Industri: Persaingan, Monopoli dan Regulasi*, LP3ES, Jakarta, 1993a.
- Hasibuan, Nurimansjah, *Pemerataan dan Pembangunan Ekonomi : Teori dan Kebijakan*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1993b.
- Tambunan, Mangara dan Sajogyo (editor), *Industrialisasi Perdesaan*, Penerbit PT. Sekindo Eka Jaya, Jakarta, 1990.
- White, Benjamin, *Agroindustri, Industrialisasi Perdesaan dan Transformasi Perdesaan*, dalam Sajogyo dan Mangara Tambunan (editor), 1990., *Industrialisasi Perdesaan*, Penerbit PT. Sekindo Eka Jaya, Jakarta, 1990.

Wilda Kamiliah, Djumilah Zain, dan Umar Burhan, Dampak Program Transmigrasi Terhadap Pendapatan dan Distribusi Pendapatan Masyarakat Tani, Wacana, Vol.1., No.1, 1998.